



► AKUNTABILITAS PUBLIK

## Sampah dan Kebencanaan Jadi Catatan DPD & BPK

**B**adan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkunjung ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY, Jumat (29/8). Kunjungan ini sebagai tindak lanjut atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) semester II/2024.

Dalam diskusi, persoalan sampah dan kebencanaan menjadi catatan.

Anggota DPD RI, Ahmad Syaqui, menjelaskan ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan ini, *pertama* yakni peningkatan kualitas dan kinerja pemerintah daerah melalui pemeriksaan. *Kedua*, bagaimana agar jika ada kerugian negara bisa segera dikembalikan dengan kualitas pengembalian yang juga baik.

"Artinya, ketepatan waktunya, pemahaman terhadap kerugian negara yang sama dan sebagainya kami sampaikan kepada pemerintah daerah melalui BPK, dan ini sudah berjalan baik di DIY. Lebih dari 90 persen sudah bisa terlaksana di DIY," katanya.

Harapannya proses ketugasan BPK tetap mengutamakan pemenuhan



Harian Jogja/Lugas Subarkah

**Badan Akuntabilitas** Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI saat berkunjung ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY, Jumat (29/8).

kebutuhan dasar rakyat. "Jadi, dalam proses pemeriksaannya proses *advising* memberikan saran kepada pemerintah daerah, sehingga paham bahwa menurunnya dana transfer ke daerah itu menuntut pemerintah daerah harus berpikir kreatif," ujarnya.

Dalam konteks itu, DPD berharap ke depan BPK RI tidak hanya menjadi

lembaga pemeriksa tetapi juga menjadi lembaga yang mampu memberikan saran terhadap pengelolaan negara.

Ketua BPK RI Perwakilan DIY, Isma Yatun, menuturkan diskusi ini mendorong jajarannya untuk bersinergi dengan semua pihak, terutama terkait dengan hasil pemeriksaan BPK. "Tindak lanjut rekomendasi sampai dengan semester

dua tahun 2024, alhamdulillah kinerjanya cukup bagus, rata-rata 94 persen dan tertinggi 97 persen pada posisi semester satu tahun 2025," ujarnya.

Adapun, beberapa catatan pada pemeriksaan periode tersebut yakni terkait dengan kinerja persampahan dan kinerja penanggulangan bencana. "Kami telah memberikan rekomendasi dan telah ditindaklanjuti. Dari jumlah 110, telah ditindaklanjuti sampai selesai sebanyak 37," katanya.

Catatan tersebut berkaitan dengan ketidakefektifan baik dari sisi regulasi, pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan pengelolaan persampahan dan penanggulangan bencana. "Kota Jogja dan Kabupaten Sleman pemeriksaannya terkait dengan pengelolaan persampahan, pemeriksaan terkait dengan penanggulangan bencana kami lakukan di Gunungkidul dan Bantul," paparnya.

Pertimbangan daerah dalam pemeriksaan tersebut berdasarkan renstra BPK yang mengacu pada RPJMD pemerintah kabupaten/kota, dan juga isu yang berkembang.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005